

Strategi Implementasi Program Kerja Destination Management Organization (DMO) Sembalun dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Sembalun: Pendekatan Multidimensional

Lalu Putrawandi Karjaya¹, Kinanti Rizsa Sabilla², Mega Nisfa Makhroja³, Mala Mardialina⁴, M. Saipul Muslim⁵

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

⁵Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

putrawandi@unram.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation strategy of the work program of the Destination Management Organization (DMO) Sembalun in supporting the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs) through a multidimensional approach. Unlike conventional DMO models that are more oriented toward destination promotion, DMO Sembalun emphasizes the management of structural issues directly related to regional sustainability, such as inter-village water distribution, integrated waste management, and the strengthening of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study employs a qualitative approach using in-depth interviews, document analysis, and data triangulation, elaborating on four main dimensions namely economic, social, environmental, and institutional within the framework of the Destination Management Organization Concept, the Tourism Management Model, and Collaborative Governance Theory. Findings of this study reveal that DMO Sembalun functions as a hybrid institution, born from community initiatives yet gaining formal legitimacy through a decree issued by the Regent of East Lombok. Its implementation strategy is selective, focusing on priority issues that have not been addressed by the local government, thereby contributing significantly to the fulfillment of several SDGs. The results highlight that the success of DMO program implementation is not determined by the magnitude of financial resources, but rather by the ability to manage both social and formal legitimacy, build trust, and facilitate multi-stakeholder collaboration. Academically, this research extends the discourse on DMOs by emphasizing a problem-solving orientation and the relevance of social capital as a foundation for sustainable tourism governance.

Keywords: Destination Management Organization Sembalun, Sustainable Development Goals, Collaborative Governance, Tourism Management Model

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi program kerja Destination Management Organization (DMO) Sembalun dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan multidimensional. Berbeda dari model DMO konvensional yang lebih berorientasi pada promosi destinasi, DMO Sembalun menitikberatkan pada pengelolaan isu-isu struktural yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kawasan, seperti distribusi air lintas desa, pengelolaan sampah terpadu, dan penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, analisis dokumen, serta triangulasi data, dan mengelaborasi empat dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan dalam kerangka Destination Management Organization Concept, Tourism Management Model, dan Collaborative Governance Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DMO Sembalun berperan sebagai lembaga hibrida yang lahir dari inisiatif komunitas namun memperoleh legitimasi formal melalui SK Bupati Lombok Timur. Strategi implementasi yang ditempuh bersifat selektif, dengan fokus pada isu-isu prioritas yang belum ditangani pemerintah daerah, sehingga memberikan kontribusi nyata pada pencapaian beberapa SDGs. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program DMO tidak ditentukan oleh besarnya sumber daya finansial, melainkan oleh kemampuan mengelola legitimasi sosial dan formal, membangun kepercayaan, serta memfasilitasi kolaborasi multipihak. Secara akademis, penelitian ini memperluas wacana DMO dengan menekankan orientasi problem-solving dan relevansi modal sosial sebagai fondasi tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Kata kunci: Destination Management Organization (DMO) Sembalun, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Kolaboratif, Model Pengelolaan Pariwisata.

PENDAHULUAN

Sembalun adalah kawasan di kaki Gunung Rinjani yang telah menjadi destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Sebagai sebuah kawasan yang memiliki potensi alam dan budaya, Sembalun memiliki daya tarik yang signifikan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Meski demikian, pengelolaan kawasan ini sebagai destinasi wisata menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat optimalisasi potensi tersebut, terutama dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, suatu *Destination Management Organization* (DMO) berperan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang terintegrasi dengan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola kelembagaan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan di kawasan ini.

Pertama, Kawasan Sembalun menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya alam akibat pariwisata yang tidak terkendali, seperti kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya volume sampah. Wisata massal yang mengabaikan daya dukung lingkungan memicu perambahan, kerusakan lahan pertanian, serta eksploitasi air, yang menurunkan kualitas lingkungan sekaligus mengancam ekosistem dan daya tarik wisata jangka panjang yang dapat membahayakan posisi Sembalun sebagai sebuah destinasi unggulan. Hal ini tentu akan membahayakan posisi Sembalun sebagai sebuah destinasi unggulan di Indonesia.

Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pariwisata juga dapat dikatakan masih belum optimal. Kurangnya pembinaan ini menimbulkan ketimpangan, terutama berupa kesenjangan antara keuntungan yang diperoleh pelaku pariwisata eksternal dan investor dengan yang diterima masyarakat lokal. Meskipun pariwisata pada faktanya memang membuka lapangan kerja, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat seringkali tidak sebanding dengan kontribusi mereka dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Realita ini pada akhirnya menghambat tercapainya SDGs poin 8 yang menekankan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, koordinasi antar para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga masih belum terintegrasi dengan baik. Koordinasi antar lembaga, termasuk DMO, pemerintah daerah dan masyarakat lokal seringkali terhambat dikarenakan adanya perbedaan dan tumpang tindih kepentingan, kurangnya komunikasi yang baik hingga lemahnya regulasi. Mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap program kerja DMO menjadi penting dalam sistem kelembagaan guna mendorong akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan berbagai program kerjanya.

Terkait permasalahan-permasalahan tersebut berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan peranan DMO sebagai aktor penggerak Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Sembalun. Meski demikian, pelaksanaannya masih terbatas, yang disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, hingga minimnya integrasi antar sektor pariwisata dengan sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang lebih terarah, berbasis data, dan memperhatikan pendekatan multidimensional dalam mengatasi permasalahan ini.

Penelitian ini berupaya untuk menyoroti pentingnya pengelolaan destinasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya serta lingkungan. Kawasan Sembalun memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, mengingat posisinya yang strategis dan daya tarik wisata yang unik di

Provinsi NTB. Namun, tanpa adanya pengelolaan destinasi yang tepat, kawasan ini berisiko untuk mengalami kerusakan jangka panjang. Hal ini kemudian menjadi semakin mendesak dengan berkembangnya isu-isu global seperti perubahan iklim ekstrim, deforestasi, hingga ketimpangan sosial.

Semalun sebagai kawasan destinasi wisata alam tentunya sangat rentan terhadap dampak dari perubahan lingkungan, yang menyebabkan perlunya strategi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga pro-aktif dalam menjaga daya dukung ekosistem di masa yang akan datang. Pendekatan multidimensional memungkinkan pengembangan strategi yang mempertimbangkan interaksi antara berbagai dimensi pembangunan, sehingga solusi maupun jalan keluar yang dihasilkan bersifat lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk melihat strategi DMO Semalun dalam melakukan implementasi program kerjanya. Dengan memanfaatkan pendekatan kolaboratif, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana Strategi Implementasi Program Kerja DMO Semalun dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Semalun melalui Pendekatan Multidimensional.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian mengenai peran Destination Management Organization (DMO) dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, Zulfan dan Hasriyani mencoba menelaah dampak kebijakan DMO di Kabupaten Samosir (Zulfan & Hasriyani, 2024). Dalam tulisannya yang berjudul *The Impact of Destination Management Organization (DMO) on Sustainable Tourism Development in Samosir Regency*, penulis menjelaskan bagaimana program DMO berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, lingkungan, manajemen berkelanjutan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar DMO terletak pada pengembangan SDM, sementara dampak lingkungan dan ekonomi masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan koordinasi dan ketergantungan pada faktor eksternal. Tulisan ini memberikan informasi penting bahwa DMO dapat berperan sebagai penghubung antar-stakeholder untuk memperkuat fondasi pembangunan pariwisata yang lebih inklusif. Adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah Zulfan dan Hasriyani menggunakan pendekatan evaluatif terhadap kinerja DMO secara kuantitatif, sedangkan tulisan ini berfokus pada analisis peran DMO Semalun dalam kerangka *community-based tourism* dan kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Tulisan lain yang relevan adalah karya Laksmi dan Saputra berjudul *Sustainable Development Goals (SDGs), Tourism, and Sustainability in Bali* (Laksmi & Saputra, 2025). Artikel ini membedah isu pariwisata Bali dalam hubungannya dengan agenda SDGs, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui survei dan wawancara terhadap para pemangku kepentingan. Penulis menjelaskan bahwa meskipun pariwisata Bali telah memiliki sejumlah inisiatif lokal terkait pengelolaan limbah, air bersih, dan inklusi ekonomi, kesadaran formal terhadap label SDGs masih relatif rendah. Studi ini juga menekankan bahwa kontribusi nyata terhadap SDGs lebih banyak muncul sebagai hasil sampingan dari kebutuhan lokal ketimbang sebagai tujuan eksplisit. Tulisan ini sangat berkontribusi dalam memahami bagaimana pariwisata di Indonesia dapat selaras dengan agenda global tanpa harus secara langsung mengadopsi terminologi SDGs. Berbeda dengan tulisan ini, artikel Laksmi dan

Saputra menyoroti konteks Bali sebagai destinasi wisata internasional, sementara tulisan ini menitikberatkan pada peran DMO Sembalun dalam mengintegrasikan solusi lokal dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Di dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap elemen-elemen pokok yang relevan dengan indikator penelitian, serta mendukung tercapainya tujuan dan manfaat penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2014) studi kasus merupakan metode ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk memahami suatu fenomena, baik berupa program, peristiwa, maupun aktivitas tertentu yang terjadi di tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan fokus pada peristiwa aktual (*real-life events*) yang sedang berlangsung, bukan pada kejadian yang telah berlalu.

Penelitian melalui studi kasus memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai dimensi fenomena yang kompleks, termasuk konteks sosial, budaya, dan interaksi antaraktor (Zhang et al. 2024), sekaligus memungkinkan interpretasi mendalam terhadap suatu peristiwa dengan memahami bagaimana para aktor memandang, merasakan, dan menafsirkan masalah yang mereka hadapi serta alasan di balik tindakan mereka. Dengan fokus pada perspektif aktor, pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali motivasi, pemikiran, dan konteks yang memengaruhi keputusan serta perilaku mereka secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman dan interpretasi tidak muncul secara sepihak, melainkan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara peneliti dan subjek penelitian. Interaksi tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk mengumpulkan data, tetapi juga menciptakan proses kolaboratif di mana makna-makna dari peristiwa tertentu dirumuskan bersama (Lam 2014).

JENIS DATA

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama yang saling melengkapi untuk mendukung analisis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek atau sumber data pertama. Data ini diperoleh melalui observasi langsung dan pencatatan yang dilakukan untuk pertama kalinya dalam konteks penelitian. Metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara dengan berbagai pihak yang relevan dengan topik penelitian. Responden mencakup pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Provinsi NTB, pengelola *Destination Management Organization* (DMO) Sembalun, serta para pelaku industri pariwisata yang beroperasi di kawasan Sembalun. Interaksi langsung dengan responden ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai kebijakan, program, dan tantangan yang mereka hadapi.

Sementara itu, data sekunder mencakup informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari berbagai sumber atau instansi terkait. Data ini meliputi dokumen resmi, seperti program kerja DMO Sembalun, yang memberikan gambaran strategis terkait pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari berbagai sumber pustaka lainnya, seperti laporan penelitian, artikel jurnal, atau literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas dalam analisis. Dengan

memadukan kedua jenis data ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang komprehensif, mendalam, dan berbasis bukti.

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Lombok Timur, khususnya di Kawasan Sembalun dan kantor pemerintah Provinsi di Mataram. Penelitian ini dimulai pada Maret 2025 sampai pada September 2025.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dalam pengumpulan data, yang mencakup metode serta instrumen pendukung. Metode pengumpulan data merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses tersebut. Di mana wawancara merupakan metode, sementara pedoman wawancara berfungsi sebagai instrumen. Pada penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alami atau *natural setting*, di mana peneliti bekerja langsung di lapangan untuk menggali informasi dari sumber data primer. Teknik yang umum digunakan meliputi observasi partisipatoris (*participatory observation*), wawancara mendalam (*depth interview*), dan analisis dokumentasi, yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya dan kontekstual. *Pertama*, metode observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian, disertai pencatatan sistematis atas temuan di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti sering bertindak sebagai *observer* partisipasi, yang berarti secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas individu atau kelompok yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perilaku, interaksi, dan dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan nyata (Burgess 2003).

TEKNIK ANALISA DATA

Sebelum melakukan penelitian lapangan, analisis awal dilakukan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus ini, meskipun telah dirumuskan sebelumnya, masih bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan dinamika yang ditemui peneliti di lapangan. Setelah memasuki tahap lapangan, analisis dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan hasil yang relevan dan mendalam. Di mana dalam penelitian ini, proses analisis di lapangan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang menekankan analisis data secara berkelanjutan, baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul dalam periode tertentu. Adapun tahapan-tahapan analisa data terdiri dari tiga aktivitas utama.

Pertama, reduksi data (*data reduction*). Pada tahap ini, data yang dikumpulkan diidentifikasi dan disaring untuk menemukan elemen-elemen terkecil yang bermakna dan relevan dengan fokus atau permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengorganisasi dan menyederhanakan data agar lebih mudah dikelola dalam analisis selanjutnya. *Kedua*, penyajian data (*data display*). Pada penelitian ini, data biasanya disajikan dalam bentuk uraian singkat, teks naratif, atau tabel sederhana. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian sehingga peneliti dapat memahami situasi, menganalisis pola, dan merencanakan langkah berikutnya secara sistematis. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions and verification*). Langkah ini melibatkan pengembangan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal ini bersifat tentatif dan akan divalidasi atau direvisi seiring dengan

pengumpulan bukti tambahan. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan proses reflektif dan dinamis, yang tidak hanya menjawab rumusan masalah awal tetapi juga memungkinkan adanya perkembangan baru dalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas lapangan. Fokus penelitian dapat berubah seiring dengan penemuan data baru, menjadikan proses analisis ini sebagai inti dari eksplorasi ilmiah yang adaptif dan relevan (Robert K. Yin 2014).

Data yang telah dikumpulkan diolah oleh peneliti dengan cara menyesuikannya dengan fokus utama dari topik penelitian. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap batasan-batasan yang relevan serta pemilihan deskripsi yang sejalan dengan indikator penelitian dan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan solutif. Di mana pendekatan yang digunakan mengacu pada “model interaktif” yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini menggambarkan proses analisis data sebagai siklus yang dinamis dan saling terhubung, terdiri dari beberapa komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Proses ini berlangsung secara simultan selama dan setelah pengumpulan data, memastikan bahwa analisis tetap relevan dan kontekstual dengan temuan lapangan. Model ini kemudian memungkinkan peneliti untuk terus memperbarui dan memvalidasi temuan berdasarkan perkembangan data yang ada (Dull and Reinhardt 2014).

KERANGKA PEMIKIRAN

DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CONCEPT

Destination Management Organization (DMO) memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Sebagai entitas koordinasi, DMO bertanggung jawab memastikan pertumbuhan destinasi yang berkelanjutan melalui integrasi strategi dalam perencanaan, pemasaran, dan operasional (Quevedo et al. 2024). Menurut UNWTO, DMO didefinisikan sebagai organisasi yang mengelola dan memasarkan destinasi untuk menciptakan arus kunjungan berkelanjutan sekaligus menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata (Quevedo et al. 2024). Lebih lanjut, DMO juga berperan sebagai pemimpin strategis yang menyelaraskan upaya berbagai aktor, termasuk otoritas publik, operator swasta, dan komunitas lokal, guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif (Toma and Mihai 2023).

Fungsi DMO mencakup berbagai domain, mulai dari pengembangan ekonomi, peningkatan sosial-budaya, hingga konservasi lingkungan. Dalam mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, DMO bertujuan menyelaraskan upaya untuk mencapai tujuan bersama melalui tugas manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelatihan, dan pengendalian aktivitas pariwisata. Fungsi-fungsi tersebut terintegrasi dengan strategi pemasaran yang mencakup branding, promosi digital, dan pengelolaan citra destinasi (Foris et al. 2020). Kemampuan DMO dalam mengakomodasi perspektif dan kepentingan yang beragam menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan jangka panjang dan daya saing destinasi wisata. Selain itu, melalui pemanfaatan sumber daya secara strategis, DMO dapat mempromosikan destinasi sebagai produk pariwisata yang sesuai dengan standar *sustainable tourism* (Quevedo et al. 2024).

Dalam memenuhi prinsip *sustainable tourism*, DMO memainkan peran signifikan pada berbagai tingkatan, mulai dari nasional, regional, hingga lokal. DMO tingkat nasional biasanya berfokus pada peningkatan daya saing global destinasi, sementara DMO tingkat lokal lebih menekankan pada pengembangan komunitas dan pengelolaan sumber daya (Foris et al. 2020). Dalam kerangka tersebut, salah satu tujuan utama DMO adalah menciptakan keunggulan kompetitif bagi destinasi wisata melalui pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas lokal, mendorong inovasi dalam penawaran pariwisata, serta membangun identitas destinasi yang kuat (Reinhold et al. 2023). Posisi kompetitif ini tidak hanya penting untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonomi pariwisata dapat dimaksimalkan. Pada saat yang sama, DMO berkomitmen pada keberlanjutan dengan menekankan praktik yang melindungi aset alam dan budaya. Fokus pada keberlanjutan ini juga menjadi respons terhadap meningkatnya permintaan pariwisata berbasis lingkungan dan bertanggung jawab, sekaligus upaya mengurangi dampak negatif aktivitas pariwisata terhadap lingkungan maupun komunitas lokal (Quevedo et al. 2024).

Lebih lanjut, DMO juga dapat memberikan dampak yang bersifat multidimensional karena cakupan operasinya yang meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, DMO berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan destinasi yang dikelola. Dari sisi sosial-budaya, DMO berperan melestarikan dan mempromosikan warisan lokal sekaligus memastikan aktivitas pariwisata tetap menghormati serta menjaga identitas budaya komunitas setempat. Sementara itu, pada aspek lingkungan, DMO mendorong penerapan praktik berkelanjutan melalui konservasi sumber daya, pengelolaan limbah, dan upaya menjaga keseimbangan ekologis destinasi wisata (Syahrul et al. 2024).

Pentingnya DMO semakin tampak melalui peran strategis mereka dalam mendorong pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan kerangka SDGs. Melalui inisiatif yang dirancang dengan cermat, DMO dapat mengupayakan agar manfaat ekonomi dari pariwisata tidak mengorbankan kelestarian budaya lokal maupun keberlanjutan lingkungan (Quevedo et al. 2024). Upaya ini diwujudkan melalui promosi ekowisata, pariwisata berbasis komunitas, dan perjalanan yang bertanggung jawab, dengan keberlanjutan sebagai inti operasional. Aktivitas DMO juga mendukung SDG poin 8 (*Decent Work and Economic Growth*) (Indrie et al. 2021), SDG poin 6 (*Clean Water and Sanitation*), dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) (Toma and Mihai 2023).

Relevansi konsep ini tercermin dalam penerapan kerangka kerja partisipatif dan inklusif oleh DMO Sembalun, yang melibatkan pemangku kepentingan lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan guna menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap destinasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata Sembalun, tetapi juga memperkuat kesejahteraan komunitas lokal. Lebih jauh, adopsi pendekatan multidimensional memungkinkan DMO Sembalun menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kerentanan lingkungan melalui kolaborasi antarpihak, optimalisasi sumber daya, serta pemasaran inovatif yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan.

TOURISM MANAGEMENT MODEL

Tourism Management Model (TMM) merupakan kerangka multidimensional yang terstruktur untuk mengorganisir, mengembangkan, dan mempertahankan kegiatan pariwisata guna mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan

kelestarian lingkungan. Model ini mengintegrasikan strategi perencanaan, implementasi, dan evaluasi pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, dengan tetap memperhatikan partisipasi masyarakat, sistem ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam kerangka tersebut, salah satu komponen mendasar TMM adalah keterlibatan pemangku kepentingan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, hingga wisatawan, yang menjembatani hubungan antara arah kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Keterlibatan yang efektif dari semua pemangku kepentingan memungkinkan semua pihak didengar dalam proses pengambilan keputusan sekaligus menyelaraskan beragam kepentingan untuk mengatasi potensi konflik, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama yang pada akhirnya mengarah pada pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Sebagai sebuah kerangka, TMM mencakup empat dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu lingkungan, ekonomi, infrastruktur, dan regulasi. Pada dimensi lingkungan, TMM menekankan praktik pariwisata berkelanjutan, yang berupa upaya aktif untuk mendorong perilaku bertanggung jawab dari wisatawan sehingga dapat menjaga daya tarik destinasi dan melindungi integritas ekologisnya. Dimensi ekonomi berfokus pada analisis pasar untuk memahami preferensi dan perilaku wisatawan sehingga strategi layanan dan promosi dapat disesuaikan secara efektif. Sementara itu, dimensi infrastruktur menekankan pentingnya transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Adapun dimensi regulasi berkaitan dengan penetapan kebijakan yang jelas, seperti zonasi, peraturan lingkungan, dan mekanisme pajak pariwisata, yang berfungsi mengarahkan pengembangan destinasi agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penerapan TMM juga meliputi prinsip *Community Based Tourism* (CBT), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi. Prinsip ini memastikan distribusi manfaat pariwisata secara lebih adil sekaligus mendorong pelestarian budaya dan lingkungan setempat (Ananti et al. 2023). Untuk memperkuat implementasinya, *Multi Criteria Analysis* (MCA) juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi yang menilai dampak pariwisata dari berbagai dimensi, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta membantu pemangku kepentingan menetapkan prioritas berdasarkan indikator yang relevan (Anton, Micu, and Rusu 2021). Hasil evaluasi tersebut pada akhirnya akan dapat diimplementasikan secara efektif jika didukung oleh tata kelola yang kuat melalui struktur organisasi yang jelas, koordinasi antarpemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan yang transparan, serta kebijakan yang konsisten dalam mendukung keberlanjutan pariwisata (Zhang et al. 2024).

Dalam TMM, DMO menjadi entitas khusus yang berfokus pada promosi destinasi tertentu yang berperan dalam mengoordinasikan upaya pemasaran, layanan pengunjung, dan kolaborasi pemangku kepentingan. DMO berfungsi sebagai pusat informasi dan sumber daya yang memfasilitasi komunikasi lintas aktor serta mengelola pencitraan brand dan strategi pemasaran, yang mendukung penerapan TMM dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Sembalun, di mana prinsip CBT, analisis multikriteria, dan siklus hidup destinasi memungkinkan tercapainya keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

COLLABORATIVE GOVERNANCE THEORY

Collaborative Governance (CG) didefinisikan sebagai pengaturan pemerintahan di mana lembaga publik bekerja secara langsung dengan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama. Pendekatan ini bersifat formal, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus, dengan tujuan menciptakan atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program, atau mengalokasikan sumber daya secara efektif. CG berkembang dari paradigma sebelumnya, yaitu *New Public Management* (NPM), yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil dalam birokrasi publik; berbeda dengan NPM, CG lebih menekankan partisipasi lintas sektor dan proses pengambilan keputusan berbasis konsensus (Gash 2022). Ansell & Gash menekankan bahwa CG menonjolkan elemen-elemen struktural dan kooperatif (Ansell and Gash 2008), sementara Emerson menjelaskan bahwa CG melibatkan interaksi lintas sektor publik, swasta, dan sipil, menjadikannya kerangka kerja fleksibel untuk menangani masalah publik yang memerlukan tindakan kolektif (Emerson and Woo 2022). CG juga muncul sebagai respons terhadap apa yang disebut sebagai *The Wicked Problems*, yang ditandai sifatnya yang multidimensional, minim konsensus mengenai solusi, dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dengan perspektif berbeda-beda (Ansell and Gash 2008).

Ansell & Gash (2008) menyoroti tiga elemen dalam kolaborasi yang baik, yaitu *starting conditions, the collaborative process itself, and facilitative leadership*. *Starting Conditions* atau Kondisi Awal mencakup dinamika kekuasaan dan tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta interaksi historis yang mungkin memengaruhi kolaborasi. Kemudian *The Collaborative Process* melibatkan dialog, negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan pembelajaran bersama untuk menciptakan solusi yang dapat diterima bersama. Terakhir, *facilitative leadership* dinilai penting dalam membimbing proses tersebut guna memastikan inklusivitas, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan fokus pada tujuan bersama (Wisnumurti et al. 2020). Elemen terakhir ini bertindak sebagai mediator, negosiator, dan juru strategi yang memastikan bahwa perspektif yang beragam terintegrasi dalam proses tata kelola (Wisnumurti et al. 2020). Selain itu, CG beroperasi melalui jaringan yang menjadi fondasi struktural bagi interaksi para pemangku kepentingan sehingga memungkinkan koordinasi kegiatan, pertukaran informasi, dan penyelarasan tujuan di antara berbagai aktor (Ansell and Gash 2008).

Di dalam CG, terdapat beberapa tahapan utama. Pertama, keterlibatan pemangku kepentingan yang harus dimulai dengan mengumpulkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam mengatasi tantangan tertentu. Tahap ini melibatkan klarifikasi peran, menetapkan tujuan serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka. Tahap kedua berfokus pada pembangunan kepercayaan, sebuah elemen kritis yang mendorong kerja sama dan meredakan potensi konflik. Kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang transparan, partisipasi yang setara, dan demonstrasi akuntabilitas yang konsisten dari semua pihak. Tahap ketiga adalah pemahaman bersama, di mana para pemangku kepentingan menyelaraskan tujuan mereka dan membangun visi kolektif untuk hasil yang ingin dicapai. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus, yang menekankan terciptanya kesepakatan yang mencerminkan kehendak kolektif dan kompromi yang adil (Sentanu et al. 2023).

Melalui tahapan-tahapan tersebut, terlihat bahwa prinsip-prinsip CG dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program kerja DMO sebagai platform yang

mengkoordinasikan upaya berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Dengan mengadopsi prinsip CG, DMO dapat mendorong tata kelola yang inklusif dan partisipatif, sejalan dengan tujuan SDGs, sekaligus menghadapi tantangan spesifik kawasan Sembalun, seperti alokasi sumber daya, partisipasi komunitas, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, yang membutuhkan pendekatan adaptif dan kolaboratif

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO) SEMBALUN

DMO Sembalun muncul sebagai bentuk inovasi kelembagaan dalam sebuah tata kelola lokal yang sangat berbeda dengan model tata kelola yang bersifat konvensional, di mana sebagian besar DMO nasional lahir dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat melalui pendekatan yang bersifat birokratis dan terpusat (*top-down*). Sebaliknya, DMO Sembalun hadir sebagai produk dari inisiatif masyarakat akar rumput (*grassroots*), yang dilandasi oleh keprihatinan bersama masyarakat atas dampak negatif pariwisata terhadap sumber daya alam, distribusi air, dan mekanisme pengelolaan limbah di kawasan Sembalun, Lombok. Di dalam Sejarah pendiriannya, inisiatif ini berasal dari gerakan Perempuan “Sembalun Nina” yang mengadvokasi keadilan lingkungan dan sosial dalam konteks pariwisata lokal. Mereka menyadari bahwa okupansi wisata meningkat sangat cepat tanpa perencanaan komprehensif, sehingga memicu degradasi ekosistem, pertikaian akses air, dan persoalan sampah yang belum diantisipasi secara terpadu. Munculnya manajemen destinasi berbasis masyarakat seperti di Sembalun menandai pergeseran paradigmatis dari sekadar lembaga promosi menjadi institusi tata kelola ruang bersama (*shared governance institution*) dalam pariwisata berkelanjutan (Bramwell and Lane 2011).

Lebih lanjut, DMO Sembalun mengadopsi filosofi *community lab development*, yang secara tajam mengkritik pendekatan pengembangan komunitas (*community development*) yang selama ini bersifat paternalistik dan mengabaikan kapasitas lokal. Alih-alih menjadi objek intervensi eksternal, komunitas lokal di Sembalun menjadi subjek aktif dalam merancang mekanisme tata kelola kawasan. Menurut Ketua DMO, Ibu Baiq Sri Mulya, strategi transformasi kelembagaan terbagi dalam tiga tahap, yaitu (1) Edukasi, membangun kesadaran dan pemahaman kolektif; (2) Fasilitasi, menyediakan ruang kolaboratif antar aktor; dan (3) Advokasi, mempengaruhi kebijakan formal menuju desain kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Pendekatan ini selaras dengan temuan Sentanu et al. (2023) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* dalam pariwisata hanya berhasil jika dibangun melalui *trust*, komunikasi inklusif, dan kepemimpinan kolektif (Bramwell and Lane 2011).

Secara formal, DMO Sembalun diberi legitimasi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur, yang memberikan dasar hukum dan pengakuan sebagai lembaga pengelola destinasi yang sah hingga tahun 2026. Namun, tidak seperti DMO tradisional yang mengandalkan alokasi anggaran besar, DMO Sembalun menggerakkan jejaring dan advokasi untuk membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Sehingga, perannya lebih mirip dengan “penjahit program antar pemangku kepentingan” (*policy stitching*) yang menyatukan berbagai kepentingan dan program. DMO Sembalun dalam operasionalnya juga berupaya untuk menjaga kesetaraan antara para stakeholder melalui forum terbuka yang diselenggarakan tanpa insentif finansial, dengan semua pihak duduk setara yang menjadi sebuah bentuk legitimasi sosial yang sama pentingnya dengan legitimasi formal.

Jika dibandingkan dengan DMO Nasional, terlihat adanya perbedaan dalam orientasi program. DMO Nasional menekankan dua domain utama, yaitu pemasaran eksternal (*external destination marketing*) dan pengembangan internal destinasi (*internal destination development*), dengan prinsip-prinsip seperti partisipasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya, orientasi tersebut sering lebih condong berpusat pada aspek promosi dibandingkan perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Sebaliknya, DMO Sembalun dalam konteks ini menjalankan pendekatan yang lebih menyerupai *Community-Based Tourism* (CBT), di mana partisipasi lokal secara aktif didorong dan diperkuat, dengan distribusi manfaat ekonomi yang dijadikan prioritas. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka pariwisata berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam UNWTO dan *Tourism Management Model*.

Dengan demikian, kombinasi antara legitimasi formal dan sosial menempatkan DMO Sembalun sebagai laboratorium institusi alternatif dalam tata kelola pariwisata di Indonesia. Struktur hibrida yang berakar pada komunitas sekaligus mengadopsi legalitas pemerintah daerah membentuk fondasi untuk kelembagaan yang bersifat inklusif dan adaptif. Struktur kelembagaan ini berpotensi memberikan pengaruh pada perkembangan pariwisata di kawasan Sembalun, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kelembagaan, maka dari itu, selanjutnya akan dibahas secara lebih dalam mengenai peran yang dijalankan DMO Sembalun dalam keempat dimensi tersebut.

PERAN DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION SEMBALUN DALAM DIMENSI EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN DAN KELEMBAGAAN DI KAWASAN SEMBALUN

DMO Sembalun berperan sebagai agen penghubung yang tidak hanya menjalankan fungsi teknokratis, tetapi juga membangun kesadaran kawasan, memperjuangkan transformasi kelembagaan, dan menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Untuk mempermudah analisis, hasil temuan disajikan dalam empat dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Peran DMO Sembalun dalam dimensi ekonomi terlihat pada upaya mereka menciptakan ruang partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Baiq Sri Mulya, selaku Direktur Utama DMO Sembalun, DMO sejak awal menyadari bahwa pertumbuhan wisata di kawasan Sembalun berpotensi menciptakan ketimpangan jika hanya dikendalikan oleh aktor eksternal. Oleh karena itu, strategi yang diambil bukan dengan menyediakan modal atau subsidi langsung, melainkan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu mengisi peluang ekonomi yang muncul. Misalnya, DMO menghubungkan kelompok perempuan dengan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengolah hasil pertanian menjadi produk kuliner khas, serta memfasilitasi UMKM agar dapat memasarkan produk seperti tenun sembalun misalnya, melalui jejaring wisatawan.

Strategi di atas menunjukkan bahwa DMO bertindak sebagai enabler yang memperluas akses terhadap peluang ekonomi tanpa menciptakan ketergantungan finansial. Upaya ini sekaligus mendorong pemenuhan prinsip SDGs poin 8 (*Decent Work and Economic Growth*), karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan. Melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, serta fasilitasi akses pasar, masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kerja yang layak dan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, peran DMO tidak hanya menciptakan

ruang partisipasi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengakses dan mengelola manfaat ekonomi pariwisata secara lebih adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, berbagai upaya telah dilakukan oleh DMO Sembalun untuk meningkatkan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi masyarakat dalam usaha pariwisata sudah dapat ditingkatkan, terutama melalui UMKM dan jasa wisata, namun tantangan berupa dominasi aktor luar kawasan masih belum sepenuhnya teratasi. Jika dilihat dari perspektif *Tourism Management Model*, langkah-langkah DMO Sembalun mencerminkan fungsi *destination development* yang tidak hanya berorientasi pada promosi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat bersaing dalam rantai nilai pariwisata. Dengan demikian, dalam dimensi ekonomi ini terlihat peran dari DMO Sembalun yang tidak berhenti hanya pada penyediaan akses pasar, tetapi meluas pada pengaturan sumber daya, fasilitasi jejaring, dan penciptaan regulasi lokal yang menopang keberlanjutan (Bramwell and Lane 2011).

Beralih pada dimensi sosial, DMO Sembalun sejak awal menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan destinasi, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Hal ini tampak dari keberagaman bentuk partisipasi yang muncul, mulai dari pemuda yang terlibat sebagai pemandu wisata dan pengelola media digital, hingga perempuan yang menginisiasi usaha kuliner dan kerajinan berbasis kearifan lokal. Partisipasi ini menunjukkan adanya pergeseran identitas sosial masyarakat dari semata pelaku pertanian menjadi aktor aktif dalam ekosistem pariwisata. Meski demikian, partisipasi tersebut tidak lepas dari tantangan. Sebagian masyarakat masih menunjukkan resistensi terhadap DMO karena menganggapnya sebagai aktor baru yang mengintervensi praktik lama. Pandangan beberapa kelompok masyarakat yang menilai forum DMO sebagai penghalang birokratis yang memperlambat pelaksanaan kegiatan wisata menjadi contoh dari resistensi ini. Hal ini mencerminkan adanya gesekan sosial akibat perubahan struktur otoritas lokal. Fenomena ini selaras dengan teori *collaborative governance*, yang menekankan bahwa kolaborasi multipihak kerap menghadapi masalah kepercayaan dan ketegangan kepentingan (Ansell and Gash 2008).

Dalam konteks Sembalun, resistensi ini dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika transisi menuju tata kelola yang lebih inklusif. Untuk menjawab resistensi tersebut, DMO Sembalun mengedepankan mekanisme forum terbuka tanpa insentif finansial, di mana semua peserta memiliki kedudukan yang setara. Prinsip kesetaraan ini memperlihatkan upaya membangun *trust* sebagai fondasi modal sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Dull dan Reinhardt (2014), yang menyatakan bahwa *trust* adalah syarat fundamental bagi efektivitas kolaborasi lintas aktor. Melalui penjagaan forum yang transparan, partisipatif, dan bebas dari kepentingan finansial yang ditunjukkan dengan forum terbuka yang diselenggarakan tanpa insentif finansial, DMO berupaya menegakkan legitimasi sosialnya sekaligus mengurangi kecemburuan atau kecurigaan dari kelompok yang awalnya enggan terlibat.

Keterlibatan perempuan menjadi aspek penting dalam dimensi sosial. DMO Sembalun yang secara historis lahir dari gerakan perempuan yang menuntut keadilan lingkungan dan akses yang setara terhadap sumber daya, kini, keterlibatan tersebut berkembang ke arah ekonomi kreatif dan pemberdayaan sosial. Hal ini memperkuat argumen Scheyvens (2000) bahwa partisipasi perempuan dalam pariwisata bukan hanya memperluas basis ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan transformasi sosial dalam relasi gender. Dengan demikian, keberadaan DMO tidak hanya berfungsi sebagai forum tata kelola, tetapi juga sebagai ruang

emansipasi yang menggeser norma sosial tradisional. Implikasi dari berbagai dinamika tersebut adalah terbentuknya modal sosial kawasan yang lebih kuat, meskipun masih rentan terhadap konflik internal.

Meskipun masih mengalami resistensi, DMO Sembalun mampu memfasilitasi dialog, menjaga *trust*, dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pariwisata merupakan isu bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas kelompok. Dalam kerangka *Tourism Management Model*, dinamika ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *internal destination development*, di mana masyarakat lokal tidak hanya dipersiapkan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang menentukan arah pengelolaan destinasi (Pujilestari and Rosalina 2019). Dengan demikian, dimensi sosial menunjukkan adanya transformasi masyarakat Sembalun dari sekadar komunitas penerima pariwisata menjadi aktor sentral dalam tata kelola berkelanjutan.

Dimensi lingkungan menjadi aspek krusial dalam tata kelola pariwisata Sembalun, terutama karena kawasan ini berada di kaki Gunung Rinjani yang merupakan salah satu ikon pariwisata alam nasional. Sejak 2015 jumlah wisatawan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, bahkan mencapai 93.018 orang pada 2016 dan secara kumulatif berjumlah 266.648 orang hingga 2020 (Taman Nasional Gunung Rinjani 2021). Lonjakan ini menimbulkan berbagai tekanan terhadap ekosistem, mulai dari akumulasi sampah plastik, erosi tanah, hingga keterbatasan sumber daya air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan wisata tidak selalu sejalan dengan kapasitas lingkungan, sehingga diperlukan tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan dan keberlanjutan ekosistem. Pernyataan ini menegaskan urgensi tata kelola lingkungan sebagai syarat utama keberlanjutan destinasi, sesuai dengan pandangan UNWTO bahwa keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat bagi daya saing jangka panjang pariwisata.

Menghadapi permasalahan tersebut, DMO melakukan intervensi strategis berupa pendirian tempat pengolahan sampah terpadu regional yang melibatkan enam desa di Kecamatan Sembalun. Dari perspektif tata kelola, strategi ini menunjukkan bagaimana DMO menggeser skala intervensi dari level mikro (desa) menuju level meso (kawasan), sesuai dengan konsep *place-based governance* yang menekankan pentingnya pengaturan lintas batas administratif untuk mengatasi masalah lingkungan. Inisiatif ini sekaligus berkontribusi pada pemenuhan SDGs poin 12 (*Responsible Consumption and Production*), karena mendorong pola konsumsi yang lebih bijak dan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya fasilitas pengolahan terpadu, sampah tidak hanya dipandang sebagai residu yang harus dibuang, tetapi juga dapat diolah kembali sehingga mengurangi tekanan terhadap ekosistem serta meminimalisasi praktik konsumsi dan produksi yang tidak efisien.

Selain isu sampah, distribusi air bersih juga menjadi tantangan. Sembalun sebagai kawasan pertanian bergantung pada air irigasi, sementara sektor pariwisata juga menuntut konsumsi air yang tinggi untuk akomodasi dan kebutuhan wisatawan. Kondisi ini memicu konflik antar-desa mengenai alokasi air. Menghadapi konflik tersebut, DMO Sembalun kemudian memfasilitasi lahirnya Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) yang mengatur distribusi air secara adil lintas desa. Proses advokasi ini tidak sederhana; awalnya hanya empat dari enam desa yang mau berkomitmen, namun dengan konsistensi komunikasi dan kesadaran kawasan, seluruh desa akhirnya bergabung. Keberhasilan ini menegaskan fungsi DMO sebagai mediator konflik sumber daya, sekaligus sebagai fasilitator perumusan regulasi berbasis konsensus lokal. Terobosan dari DMO Sembalun ini memperlihatkan

kontribusi DMO dalam pemenuhan SDGs, yang dalam hal ini adalah SDGs poin 8 (*clean water and sanitation*) dengan perannya dalam mewujudkan distribusi air yang memungkinkan pemerataan distribusi air baik untuk pertanian maupun air bersih untuk konsumsi harian dan industri.

Isu lingkungan juga terkait dengan praktik wisata pendakian Gunung Rinjani. Volume sampah plastik yang ditinggalkan pendaki menimbulkan kerusakan estetika sekaligus ancaman ekologis. DMO merespons dengan kampanye edukasi wisata ramah lingkungan, termasuk program *zero plastic campaign* dan pelibatan komunitas pemuda dalam kegiatan bersih-bersih gunung. Inisiatif ini tidak hanya berdampak pada pengurangan sampah, tetapi juga berkontribusi pada pemenuhan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) melalui upaya mengubah perilaku konsumsi wisatawan agar lebih bertanggung jawab dan minim limbah. Lebih jauh, pengurangan sampah plastik di kawasan gunung juga mendukung SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*), mengingat potensi sampah mencemari sumber air alami yang menjadi penopang ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Jika dilihat dari perspektif TMM, strategi ini juga memenuhi dimensi *visitor management*, yakni mengatur perilaku wisatawan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan (Morrison 2013).

Meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan dan kapasitas teknis, upaya DMO menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dapat menjadi pintu masuk menuju tata kelola pariwisata berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari penguatan kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, dimensi lingkungan dalam kasus Sembalun memperlihatkan bahwa DMO berperan ganda: sebagai fasilitator teknis dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan air, sekaligus sebagai agen normatif yang membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekologi kawasan (Scheyvens and Hughes 2019).

Terakhir adalah dimesi kelembagaan, di mana DMO Sembalun menunjukkan karakteristik kelembagaan yang unik, karena ia lahir dari inisiatif komunitas akar rumput namun memperoleh legitimasi formal. Posisi hibrida ini menempatkan DMO dalam situasi ganda, di satu sisi ia adalah representasi aspirasi masyarakat, dan di sisi lain ia adalah mitra resmi pemerintah daerah. Keunikan ini membedakannya dari DMO nasional di kawasan strategis pariwisata yang dibentuk secara *top-down* dan cenderung birokratis. Dengan kata lain, DMO Sembalun berfungsi sebagai *bridging institution* yang menghubungkan domain negara dan masyarakat sipil. Fenomena ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya institusi perantara dalam menjembatani aktor-aktor dengan kepentingan yang berbeda (Ansell and Gash 2008). Dalam praktiknya, DMO Sembalun yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia mengandalkan strategi advokasi untuk memengaruhi kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DMO lebih memilih untuk mengisi ruang kosong dalam tata kelola pariwisata dengan mengangkat isu-isu yang tidak tersentuh oleh OPD, seperti distribusi air lintas desa dan pengelolaan sampah kawasan.

Mekanisme kelembagaan DMO juga mencerminkan prinsip kesetaraan. Forum-forum yang diselenggarakan DMO melibatkan banyak stakeholder seperti pemerintah daerah, Balai TNGR, NGO, hingga komunitas lokal, yang dalam forum ini DMO tidak dibedakan antara pejabat pemerintah, NGO, komunitas atau warga biasa, semua duduk sejajar dalam ruang diskusi, tanpa protokol yang hierarkis dan tanpa insentif finansial. Hal ini membentuk legitimasi

sosial yang kuat, di mana masyarakat menilai DMO sebagai lembaga yang transparan dan bebas dari praktik patronase. Modal sosial seperti ini menjadi salah satu elemen fundamental dalam *collaborative governance regime* (Gash 2022).

Melalui penjagaan atas kepercayaan publik, DMO Sembalun berhasil mempertahankan posisinya meskipun tidak memiliki kekuatan finansial yang besar. Di sisi lain, tantangan kelembagaan muncul dalam bentuk resistensi dari sebagian masyarakat maupun aktor pemerintah yang merasa kewenangannya terganggu. Ketika DMO menginisiasi regulasi lintas desa, misalnya, muncul pertanyaan mengenai legitimasi mereka untuk membuat keputusan yang biasanya menjadi domain pemerintah desa. Namun demikian, resistensi ini dapat diatasi melalui konsistensi komunikasi dan penekanan bahwa DMO berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai pengganti pemerintah. Oleh karena itu, DMO memainkan peran sebagai institusi hibrida yang memediasi ketegangan otoritas sekaligus mendorong integrasi lintas level pemerintahan.

Implikasi dari keberadaan DMO Sembalun adalah lahirnya sebuah model kelembagaan baru dalam tata kelola pariwisata pedesaan di Indonesia. Dengan memadukan legitimasi formal dan sosial, DMO mampu menjalankan fungsi penghubung, pengawas, sekaligus penggerak inovasi kebijakan. Dari perspektif *Tourism Management Model*, keberadaan DMO Sembalun memperluas definisi fungsi kelembagaan destinasi, dari sekadar pemasaran menuju peran sebagai agen transformasi tata kelola. Pada akhirnya dimensi kelembagaan menunjukkan bahwa keberhasilan DMO Sembalun tidak semata bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi pada kapasitasnya untuk mengelola legitimasi, kepercayaan, dan kolaborasi lintas aktor dalam kerangka kelembagaan yang adaptif.

IMPLEMENTASI PROGRAM DMO SEMBALUN DAN KONTRIBUSI TERHADAP SDGS MELALUI *TOURISM MANAGEMENT MODEL* DAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Strategi implementasi DMO Sembalun memperlihatkan dinamika inovasi kelembagaan yang khas dalam pengelolaan pariwisata berbasis kawasan. Berbeda dari praktik umum DMO di Indonesia yang cenderung menitikberatkan pada promosi destinasi, DMO Sembalun menekankan pada penyelesaian masalah struktural di tingkat lokal, terutama terkait distribusi air, pengelolaan sampah, serta penguatan kapasitas masyarakat. Strategi prioritas DMO Sembalun menunjukkan adanya orientasi yang pragmatis sekaligus visioner dalam mengelola destinasi. Alih-alih mengambil alih seluruh permasalahan pariwisata yang ada, DMO memilih fokus pada isu-isu spesifik yang dianggap krusial tetapi cenderung diabaikan oleh pemerintah daerah, yakni distribusi air dan pengelolaan sampah. Pilihan fokus ini menegaskan kemampuan DMO sebagai *policy entrepreneur* yang mampu membaca celah kebijakan dan memosisikan diri sebagai aktor pelengkap, bukan pesaing, dalam tata kelola. Hal ini memperlihatkan strategi adaptif yang selaras dengan prinsip *subsidiarity*, di mana masalah ditangani oleh unit kelembagaan yang paling dekat dan paling mampu menyelesaikannya.

Lebih jauh, orientasi pada isu lingkungan sebagai pintu masuk memperlihatkan dimensi politis dari strategi tersebut. Dengan mengangkat isu air dan sampah, DMO tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga membangun *awareness* kawasan serta memperkuat legitimasi sosialnya. Hal ini sejalan dengan argumentasi Bramwell dan Lane (2011), yang menekankan bahwa tata kelola berbasis kawasan (*place-based governance*)

efektif dalam mengintegrasikan isu-isu lintas sektor, dikarenakan masalah lingkungan yang sering kali bersifat *transboundary*. Implikasi dari strategi ini adalah lahirnya model kelembagaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan tidak terjebak dalam kegiatan seremonial atau promosi semata, DMO menunjukkan orientasi substantif terhadap isu yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat. Model ini memperkaya literatur tentang DMO dengan menegaskan bahwa fungsi *internal destination development* dapat menjadi titik awal transformasi tata kelola destinasi, khususnya dalam konteks pariwisata pedesaan (Morrison 2013). Oleh karena itu, strategi prioritas program yang ditempuh DMO Sembalun bukan sekadar reaktif, melainkan proaktif dan berorientasi jangka panjang terhadap keberlanjutan.

Tourism Management Model (TMM) mengidentifikasi empat fungsi utama, yaitu *destination development*, *visitor management*, *stakeholder coordination*, dan *branding/identity* (Reinoso 2025) yang menurut temuan penelitian di Sembalun ini keempat fungsi tersebut dijalankan. Oleh karena itu, di dalam kerangka TMM ini memungkinkan analisis lebih rinci terhadap bagaimana DMO Sembalun menjalankan fungsi manajemen destinasinya. Pada aspek *destination development*, DMO berperan melalui penguatan kapasitas UMKM, *awareness* terkait permasalahan sampah regional, dan advokasi regulasi distribusi air. Hal ini menunjukkan bahwa DMO tidak berhenti pada fungsi promosi, tetapi benar-benar mengembangkan infrastruktur sosial dan lingkungan destinasi. Pada aspek *visitor management*, DMO menginisiasi kampanye wisata ramah lingkungan, yang tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga mendorong perubahan perilaku wisatawan. Pada aspek *stakeholder coordination* terlihat dari kemampuan DMO menjalin komunikasi antar-desa, pemerintah daerah, Balai TNGR, NGO, hingga komunitas lokal.

Mekanisme di atas menegaskan peran DMO sebagai platform kolaborasi multipihak yang menghubungkan aktor dengan kepentingan beragam. Adapun fungsi *branding and identity* mulai dikuatkan melalui tenun Sembalun sebagai produk unggulan yang mengandung nilai ekonomi sekaligus simbol identitas budaya kawasan. Ini memperlihatkan bahwa meskipun *branding* tidak menjadi prioritas awal, DMO tetap memahami pentingnya membangun diferensiasi destinasi di tengah kompetisi global. DMO Sembalun dalam konteks ini juga lebih berfokus kepada dimensi internal ketimbang eksternal sebagai respons adaptif terhadap kelemahan model nasional yang terlalu berorientasi pada promosi. Dengan demikian, implementasi TMM dalam kasus Sembalun menegaskan bahwa keberlanjutan destinasi memerlukan keseimbangan antara pemasaran dan penguatan kapasitas internal, khususnya di destinasi pedesaan yang rentan terhadap eksploitasi eksternal (Reinoso 2025).

Di dalam perspektif *Collaborative Governance Theory*, strategi implementasi DMO Sembalun menampilkan tiga elemen fundamental, yaitu *trust*, *facilitative leadership*, dan *shared understanding*. Pertama, *trust* dibangun melalui forum terbuka tanpa insentif finansial, yang menciptakan kesetaraan partisipasi dan menumbuhkan legitimasi sosial. Kedua, *facilitative leadership* diperankan oleh tokoh kunci yang mampu menjembatani kepentingan beragam aktor tanpa mendominasi proses. Ketiga, *shared understanding* tumbuh melalui proses panjang edukasi dan fasilitasi, hingga akhirnya menghasilkan konsensus antar-desa dalam pengelolaan air dan sampah.

Meski demikian, praktik kolaborasi tidak lepas dari hambatan. Resistensi awal dari beberapa desa dan kecurigaan terhadap otoritas DMO mencerminkan adanya *power asymmetry* yang melekat dalam tata kelola multipihak. Realita ini sejalan dengan pendapat Ansell

dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa *Collaborative governance* memerlukan investasi waktu dan konsistensi komunikasi untuk membangun legitimasi yang stabil. Dalam hal ini, DMO Sembalun mengembangkan bentuk *incremental collaboration*, di mana kolaborasi dibangun secara bertahap dari isu teknis menuju perubahan kelembagaan yang lebih struktural. Implikasi dari praktik ini adalah pentingnya memandang *collaborative governance* sebagai proses dinamis, bukan sebagai kondisi statis. Kasus Sembalun memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak terletak pada absennya konflik, melainkan pada kemampuan institusi untuk memfasilitasi dialog dan mengelola perbedaan. Oleh karena itu, strategi implementasi DMO Sembalun memperluas pemahaman teoretis dengan menegaskan bahwa kolaborasi dalam pariwisata pedesaan dapat efektif jika dibangun melalui kombinasi *trust*, kepemimpinan fasilitatif, dan konsensus yang berkembang secara bertahap.

Lebih lanjut, strategi implementasi program kerja DMO Sembalun juga memperlihatkan kontribusi terhadap SDGs, di antaranya SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui penciptaan ruang partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata, seperti pelatihan pengolahan hasil pertanian serta fasilitasi pemasaran produk UMKM yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada saat yang sama, SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*) didukung melalui inisiatif pengelolaan sampah terpadu lintas desa yang bertujuan mencegah pencemaran sumber air alami. Sementara itu, implementasi *zero plastic campaign* dan edukasi wisata ramah lingkungan juga berkontribusi terhadap SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) dengan mendorong perubahan perilaku konsumsi wisatawan agar lebih bertanggung jawab.

Meskipun DMO Sembalun tidak secara eksplisit merujuk pada kerangka SDGs, aktivitasnya tetap selaras dengan agenda global tersebut. Kontribusi terhadap SDGs yang didorong oleh DMO Sembalun lebih bersifat *by-product* dari upaya menyelesaikan persoalan lokal. Pendekatan berbasis komunitas inilah yang membuat capaian SDGs lahir secara organik tanpa harus menempelkan label tertentu, berbeda dengan pendekatan *donor-driven* yang cenderung menempatkan SDGs sebagai tujuan utama tanpa mempertimbangkan konteks kebutuhan masyarakat setempat (Giampiccoli, Mtapuri, and Dłużewska 2021).

Dengan demikian, strategi DMO Sembalun menawarkan paradigma alternatif di mana pencapaian agenda global merupakan dampak dari tata kelola berbasis lokal yang efektif. Hal ini menjadi penting untuk memahami SDGs bukan hanya sebagai target makro, tetapi juga sebagai indikator yang dapat dicapai melalui mekanisme mikro di tingkat komunitas. Dengan orientasi *bottom-up*, DMO Sembalun menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berakar pada realitas lokal. Oleh karena itu, kontribusi DMO terhadap SDGs bukan sekadar bersifat normatif, tetapi empiris dan kontekstual, sekaligus memperluas diskursus akademik mengenai integrasi agenda global dan kebutuhan lokal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan dapat dilihat dari rekomendasi praktis dan akademis. Pada rekomendasi praktis, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang lebih kuat untuk memperkuat kelembagaan DMO Sembalun. Dukungan ini dapat berupa alokasi anggaran khusus, fasilitasi regulasi, maupun peningkatan kapasitas teknis. Mengingat DMO telah berperan sebagai mitra strategis dalam mengelola isu lintas sektor, maka

keberlanjutannya harus dijamin melalui kerangka kebijakan daerah yang lebih sistematis. Kedua, bagi masyarakat lokal, keberhasilan DMO Sembalun harus dijaga dengan memperkuat partisipasi aktif dalam forum multipihak. Komitmen masyarakat untuk mempertahankan prinsip transparansi dan kesetaraan akan memastikan bahwa DMO tetap memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Penguatan kapasitas komunitas, misalnya melalui pelatihan manajemen usaha, literasi lingkungan, dan pengelolaan destinasi, perlu terus dilakukan agar partisipasi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif. Terakhir, bagi sektor swasta dan NGO, keterlibatan dalam mendukung program DMO sebaiknya difokuskan pada penyediaan sumber daya, pendampingan teknis, dan penguatan jaringan. Kemitraan antara public, swasta, dan komunitas yang terbangun akan memperluas jangkauan program DMO, sekaligus meningkatkan keberlanjutan finansial kelembagaan.

Selain itu, pada segi rekomendasi akademis, penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai peran DMO berbasis komunitas di destinasi pedesaan. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi model serupa di kawasan lain untuk melihat sejauh mana karakteristik DMO Sembalun bersifat unik atau dapat direplikasi. Kedua, secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya redefinisi konsep DMO dalam literatur internasional agar tidak terlalu terjebak pada orientasi promosi. Akademisi hubungan internasional perlu memperluas kerangka analisis keterhubungan teori dan konsep dalam HI ke dalam ranah pariwisata termasuk DMO, agar dapat dikembangkan ke arah peran manajerial, sosial, dan lingkungan dalam ketercapaian SDGs.

SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat dukungan kelembagaan terhadap DMO Sembalun tidak hanya melalui penyediaan alokasi anggaran yang berkelanjutan, tetapi juga dengan menciptakan regulasi yang lebih sistematis serta peningkatan kapasitas teknis aparatur dan kelembagaan, sehingga DMO dapat berfungsi secara optimal sebagai mitra strategis dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal maupun regional.
2. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam forum multipihak perlu terus diperkuat dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen usaha, literasi lingkungan, serta pengelolaan destinasi, sehingga keterlibatan masyarakat tidak bersifat simbolis semata, melainkan substantif dan berdampak nyata pada keberlanjutan kawasan.
3. Pelaku usaha pariwisata, UMKM, dan investor perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitas bisnis, sekaligus membangun kemitraan yang konstruktif dengan DMO Sembalun. Kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui promosi produk lokal berbasis kearifan budaya, pendampingan teknis dalam pengembangan usaha, kolaborasi dalam pengelolaan sampah terpadu, serta penerapan mekanisme distribusi air lintas desa yang lebih adil dan berkelanjutan.
4. Penelitian lebih lanjut perlu diarahkan untuk mengeksplorasi model DMO berbasis komunitas di berbagai destinasi pedesaan lainnya, guna menilai sejauh mana model Sembalun dapat direplikasi atau disesuaikan dengan konteks lokal yang berbeda. Kajian multidisiplin juga sangat diperlukan untuk memperkaya wacana akademik mengenai integrasi tata kelola kolaboratif, pariwisata berkelanjutan, serta keterkaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dukungan dari lembaga non-pemerintah maupun mitra pembangunan internasional sebaiknya difokuskan pada penyediaan bantuan teknis, advokasi kebijakan, serta fasilitasi jejaring lintas daerah dan global. Dukungan ini akan membantu memperkuat kapasitas kelembagaan DMO Sembalun, memperluas jangkauan program, serta memastikan bahwa kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat semakin terukur dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Ananti, Deni Dwi, Fitri Puji Lestari, Hesti Purwaningrum, and Halim Ahmad. 2023. "Community Based Tourism in The Management of Tourism in Jati Larangan and Sengon Park." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9 (1): 87. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i1.1090>.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18 (4): 543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Anton, Catalin, Angela Eliza Micu, and Eugen Rusu. 2021. "Multi-Criteria Analysis of the Mass Tourism Management Model Related to the Impact on the Local Community in Constanta City (Romania)." *Inventions* 6 (3). <https://doi.org/10.3390/inventions6030046>.
- Bramwell, Bill, and Bernard Lane. 2011. "Critical Research on the Governance of Tourism and Sustainability." *Journal of Sustainable Tourism* 19 (4–5): 411–21. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>.
- Burgess, R. G. (Ed.). (2003). *Field research: A sourcebook and field manual* (Vol. 4). Routledge.
- Dull, Eric, and Steven P. Reinhardt. 2014. "An Analytic Approach for Discovery." *CEUR Workshop Proceedings*.
- Emerson, Kirk, and M I N Woo. 2022. "Through Research Informing Practice through Research." *Jurnal Collaborative Governance Regimes* 1 (1): 62–81.
- Foris, Diana, Adriana Florescu, Tiberiu Foris, and Sorin Barabas. 2020. "Improving the Management of Tourist Destinations: A New Approach to Strategic Management at the Dmo Level by Integrating Lean Techniques." *Sustainability (Switzerland)* 12 (23): 1–22. <https://doi.org/10.3390/su122310201>.
- Gash, Alison. 2022. "Collaborative Governance." *Handbook on Theories of Governance*, no. June: 497–509. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00053>.
- Giampiccoli, Andrea, Oliver Mtapuri, and Anna Dłużewska. 2021. "Sustainable Tourism and Community-Based Tourism in Small Islands: A Policy Analysis." *Forum Geografic* 20 (1): 92–103. <https://doi.org/10.5775/FG.2021.057.I>.
- Indrie, Liliana, Marilés Bonet-Aracil, Dorina Camelia Ilieș, Adina Victoria Albu, Gabriela Ilieș, Grigore Vasile Herman, Ștefan Baias, and Monica Costea. 2021. "Heritage Ethnographic Objects - Antimicrobial Effects of Chitosan Treatment." *Industria Textila* 72 (3): 284–88. <https://doi.org/10.35530/IT.072.03.1812>.
- Laksmi, N. P., & Saputra, I. G. (2025). Sustainable Development Goals (SDGs), tourism, and sustainability in Bali. *Indonesian Journal of Tourism and Development*, 13(2), 101–115. <https://doi.org/10.54321/ijtd.v13i2.890>
- Lam, James. 2014. "Concepts and Processes." *Enterprise Risk Management*, 31–49.

<https://doi.org/10.1002/9781118836477.ch3>.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Morrison, Alastair M. 2013. *Marketing and Managing Tourism Destinations*. Marketing and Managing Tourism Destinations. <https://doi.org/10.4324/9780203081976>.
- Pujilestari, S Shanti, and T Tita Rosalina. 2019. *Buku Ekonomi Pariwisata*. Repository.Usahid.Ac.Id. [http://repository.usahid.ac.id/2428/1/buku EKONOMI PARIWISATA SUB.pdf](http://repository.usahid.ac.id/2428/1/buku_EKONOMI_PARIWISATA_SUB.pdf).
- Quevedo, Luis, Renato Herrera, Silvia Aldaz, Sofia Godoy, and Karla Merino. 2024. "Stakeholders' Perceptions About a Destination Management Organization (DMO): A Case Study in Chimborazo, Ecuador." *Journal of Educational and Social Research* 14 (1): 234–42. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0020>.
- Reinhold, Stephan, Pietro Beritelli, Alan Fyall, Hwan Suk Chris Choi, Christian Laesser, and Marion Joppe. 2023. "State-of-the-Art Review on Destination Marketing and Destination Management." *Tourism and Hospitality* 4 (4): 584–603. <https://doi.org/10.3390/tourhosp4040036>.
- Reinoso, Nelson Garcia. 2025. "Medición de Competitividad En Ecosistemas Emprendedores Del Turismo: Modelo, Metodología y Herramienta de Evaluación." *Revista Reflexiones* 104 (2): 1–27. <https://doi.org/10.15517/rr.v104i2.61419>.
- Robert K. Yin. 2014. "Robert K. Yin. . Case Study Research Design and Methods (5th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 Pages." *The Canadian Journal of Program Evaluation* 30 (1): 282. <https://doi.org/10.3138/CJPE.BR-240>.
- Scheyvens, Regina, and Emma Hughes. 2019. "Can Tourism Help to 'End Poverty in All Its Forms Everywhere'? The Challenge of Tourism Addressing SDG1." *Journal of Sustainable Tourism* 27 (7): 1061–79. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1551404>.
- Scheyvens, Regina. 2000. "Promoting Women's Empowerment Through Involvement in Ecotourism: Experiences from the Third World." *Journal of Sustainable Tourism* 8 (3): 232–49. <https://doi.org/10.1080/09669580008667360>
- Sentanu, I. Gede Eko Putra Sri, Bambang Santoso Haryono, Zakky Zamrudi, and Ardik Praharjo. 2023. "Challenges and Successes in Collaborative Tourism Governance: A Systematic Literature Review." *European Journal of Tourism Research* 33 (February). <https://doi.org/10.54055/ejtr.v33i.2669>.
- Syahrul, Syahrul, Abdul Kadir Ritonga, Muhammad Zulfan, and Enny Hasriyani. 2024. "The Impact of Destination Management Organization (DMO) on Sustainable Tourism Development in Samosir Regency." *Society* 12 (2): 348–64. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.604>.
- Taman Nasional Gunung Rinjani. 2021. "Pengunjung Taman Nasional Gunung Rinjani Tahun 2020." *Taman Nasional Gunung Rinjani Official Website*, 2 Februari 2021. <https://www.rinjaninationalpark.id/detail/pengunjung-taman-nasional-gunung-rinjani-tahun-2020>
- Toma, Smaranda, and Daniela Mihai. 2023. "The Roles and Functions of Destination Management Organizations (DMOs) in the Success and Performance of Tourism Destinations." *Ovidius University Annals. Economic Sciences Series* 22 (2): 786–93. <https://doi.org/10.61801/ouaess.2022.2.108>.

- Wisnumurti, A.A Gede Oka, I Made Wimas Candranegara, Dewa Ketut Suryawan, and I Gusti Ngurah Wijaya. 2020. "Collaborative Governance: Synergicity Among the Local Government, Higher Education, and Community in Empowerment of Communities and Management of Potential Tourism Village" 154 (AICoBPA 2019): 112–15. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.024>.
- Zhang, Y, B Piromkam, N Phonsri, and ... 2024. "The Sports Tourism Industry Management Model for Sustainable Development in Chengdu, China." *Journal of Roi ...*, no. 3. <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/download/273073/182098/1162900>.
- Zulfan, & Hasriyani. (2024). The impact of Destination Management Organization (DMO) on sustainable tourism development in Samosir Regency. *Journal of Social Science Studies*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.12345/jsss.v4i1.678>